

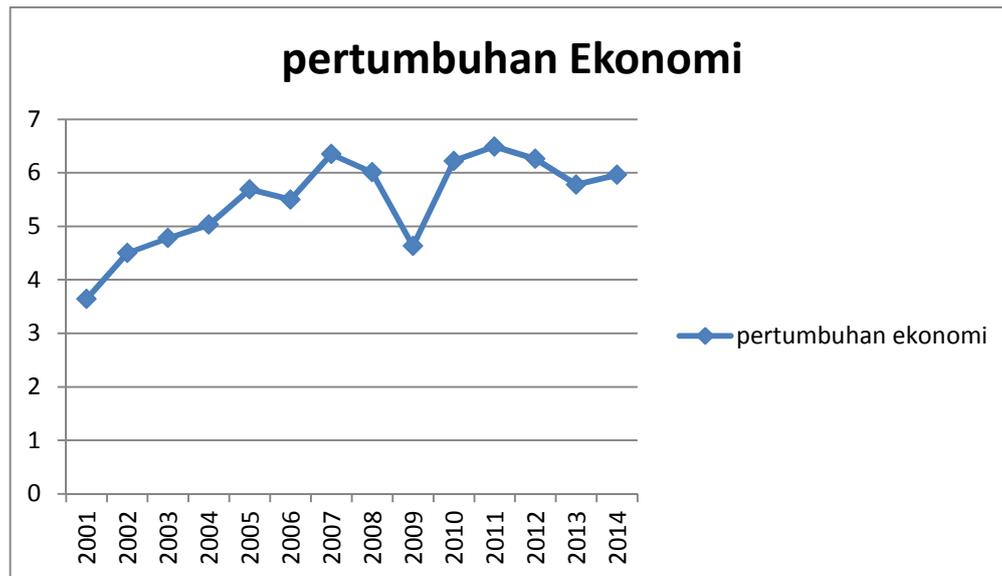
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan moneter (monetary policy) merupakan komponen kunci kebijakan ekonomi. Kebijakan moneter adalah segenap tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengubah kondisi-kondisi moneter dan keuangan dalam perekonomian yang bersangkutan. Tujuannya, terciptanya inflasi rendah yang disertai pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, neraca pembayaran yang tetap seimbang, serta suku bunga dan kurs yang stabil. Instrumen kebijakan yang digunakan bank sentral demi menciptakan perubahan kondisi moneter dan finansial meliputi pengaturan suku bunga jangka pendek, kontrol terhadap kredit perbankan, serta pengelolaan cadangan perbankan. (A.A. Hossain, 2010).

Menurut UU no 3 tahun 2004, Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia berupaya memelihara kestabilan nilai rupiah secara berkesinambungan dimaksudkan untuk menciptakan inflasi yang rendah dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

(Bank Indonesia, 2005)



Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha 2001-2014

(Sumber : Badan Pusat Statistik dan LPI)

Dimulai tahun 2001 hingga 2005, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan secara perlahan namun stabil. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2008-2009 yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami *Shock* yaitu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,83 % pada tahun 2009 menjadi sebesar 4,63% dari 6,01 % pada tahun 2008. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1,59% yakni menjadi 6,44 %. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan tertinggi sejak tahun 2000 yaitu sebesar 6,49 %. Pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 6,26 % dan 5,78 %. Dan diperkirakan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,18% yaitu menjadi 5,96%.

Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan harga melalui mekanisme transmisi

yang terjadi. Bank sentral yang dapat mengelola ekspektasi inflasi agen ekonomi akan dapat menjalankan kebijakan moneter secara lebih efektif dan kebijakan moneter yang demikian dapat dikatakan kredibel (Blinder, 1999). Untuk itu, otoritas moneter harus memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme transmisi negaranya.

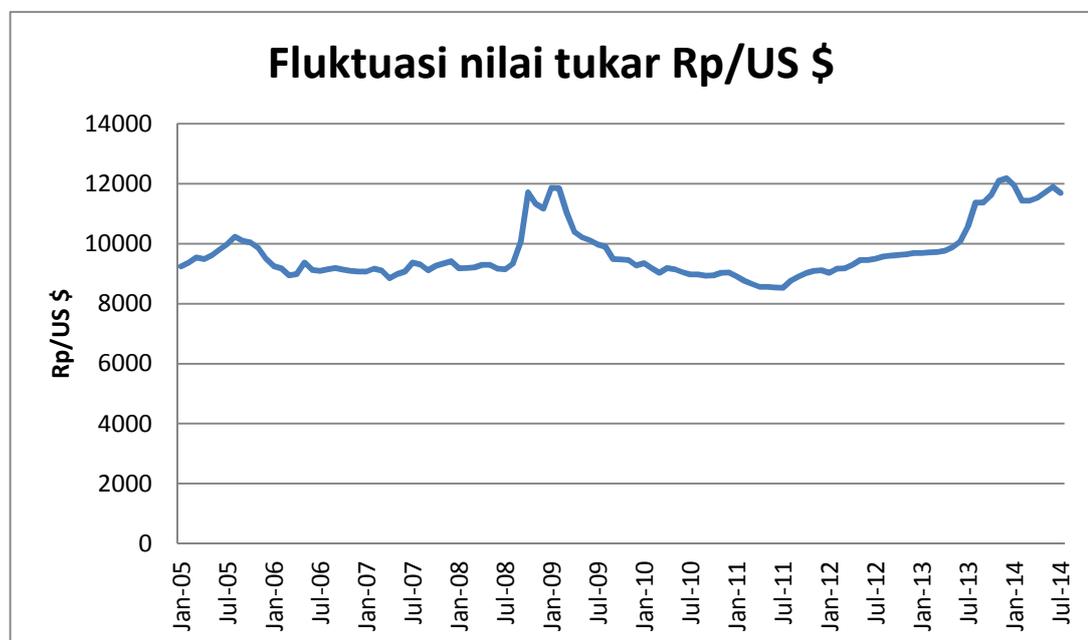
Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat bekerja melalui berbagai saluran, seperti suku bunga, agregat moneter, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi (Warjiyodan Agung, 2002). Dengan digunakannya instrumen suku bunga dalam rezim moneter *inflation targeting framework*, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menjadi salah satu topik bahasan penting. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara suku bunga dalam perekonomian (yang merupakan harga peminjaman uang) dengan uang beredar untuk mempengaruhi tujuan - tujuan pembangunan ekonomi, seperti pengendalian harga (inflasi dan nilai tukar), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Hal ini dimungkinkan karena otoritas moneter suatu negara pada umumnya memiliki otoritas tunggal dalam mencetak dan mengedarkan uang resmi negara, sehingga otoritas moneter dapat mempengaruhi suku bunga dalam perekonomian melalui kemampuannya mengubah jumlah uang beredar untuk mencapai tujuan akhir kebijakan. (Ascarya, BEMP, 2012).

Sejak pemerintah memberlakukan rezim nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), penggunaan instrumen kebijakan moneter semakin intensif dilakukan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Salah satu persoalan eksternal perekonomian Indonesia adalah ketidakstabilan nilai tukar. Karena nilai tukar dapat didefinisikan sebagai harga mata uang asing yang dinyatakan kedalam mata

uang domestik, maka definisi nilai tukar mengacu pada harga relatif, yang seharusnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran relatif.

Selanjutnya karena harga relatif melibatkan dua mata uang asing, maka nilai tukar seharusnya berhubungan dengan permintaan dan penawaran dari kedua jenis mata uang ini. Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat jika terjadi kelebihan penawaran diatas permintaan dan sebaliknya nilai tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan diatas penawaran yang ada di pasar valuta asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar.

(Muwarni, 2007)



Gambar 2. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika 2005:01 – 2014:07 (nominal)

(Sumber :Bank Indonesia ,Data diolah)

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara umum cukup stabil. Pada juli 2013 sampai 2014 terjadi kenaikan Rupiah antara Rp. 10000,-/\$ US hingga Rp. 12.000,-/ \$US. Kenaikan terjadi kembali semenjak Tahun 2008-2009. Naik atau turunnya nilai tukar karena dipengaruhi ketidakstabilan faktor eksternal (luar negeri) dan internal (dalam negeri). Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Faktor fundamental tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor impor . Sementara itu, faktor non fundamental antara lain dapat berupa sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam memperhitungkan informasi, atau perkembangan lain dalam menentukan nilai tukar sehari-hari. (Sri Muwarni, 2007). Selain itu, penguatan Rupiah juga disumbang oleh peningkatan investasi portofolio oleh investor. Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya. Dengan kejadian ini tentu akan menguntungkan dunia perbankan. Penyesuaian nilai tukar yang terlalu cepat akan sangat merugikan karena hal ini dapat mendorong bergeraknya aliran dana masyarakat ke luar negeri. Dengan demikian antara nilai tukar dan indikator kebijakan moneter lainnya memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya bagi kebijakan pemerintah yang sedang ditempuh untuk menstabilkan nilai tukar dan inflasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang kebijakan moneter akan mempengaruhi inflasi. Inflasi yang rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dalam jangka panjang. Namun disisi lain penetapan kebijakan moneter yang tidak terukur dapat menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang secara umum (Mankiw, 2003). Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Baasir, 2003:265). Hal ini sangat strategis dengan penerapan *Inflation Targeting Framework* untuk mencapai sasaran akhir yaitu kesinambungan inflasi yang rendah. Sehingga stabilitas yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Inflation targeting framework atau ITF merupakan salah satu strategi kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif (kisaran target) dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta adanya pernyataan eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. Keutamaan dari ITF adalah adanya komunikasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan dari kebijakan moneter, dan bahkan untuk beberapa

negara, komunikasi juga sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri juga dilakukan. (Abdul kadir, 2008)

Inflation targeting framework (ITF) adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang ditandaidengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode tertentu. *Inflation targeting* secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. (Maimun Sholeh, 2010)

Inflation targeting framework (ITF) atau Kerangka Penargetan inflasi adalah kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi selama beberapa tahun kedepan yang secara eksplisit diarahkan dan diumumkan (BankIndonesia). Kerangka kerja *inflation targeting framework* mencerminkan kebijakan moneter yang *forward looking* yang difokuskan pada inflasi dan ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Fitur penting ITF adalah komitmen terhadap inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter, pengumuman target inflasi, komunikasi yang intensif termasuk penjelasan tujuandan langkah – langkah kebijakan moneter, serta akuntabilitas untuk memenuhi target inflasi (Mishkin, 2008).

Kebijakan penargetan inflasi mulai diperbincangkan oleh *World Bank* dan diadopsi pada tahun 1970. Dalam konsensus tersebut para pakar kebijakan moneter berupaya untuk menaikkan pertumbuhan PDB dan mengurangi pengangguran yang berkesinambungan ketika inflasi tinggi namun tidak secara terus menerus ketika pengangguran rendah atau Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian kerangka penargetan inflasi dengan stabilitas harga

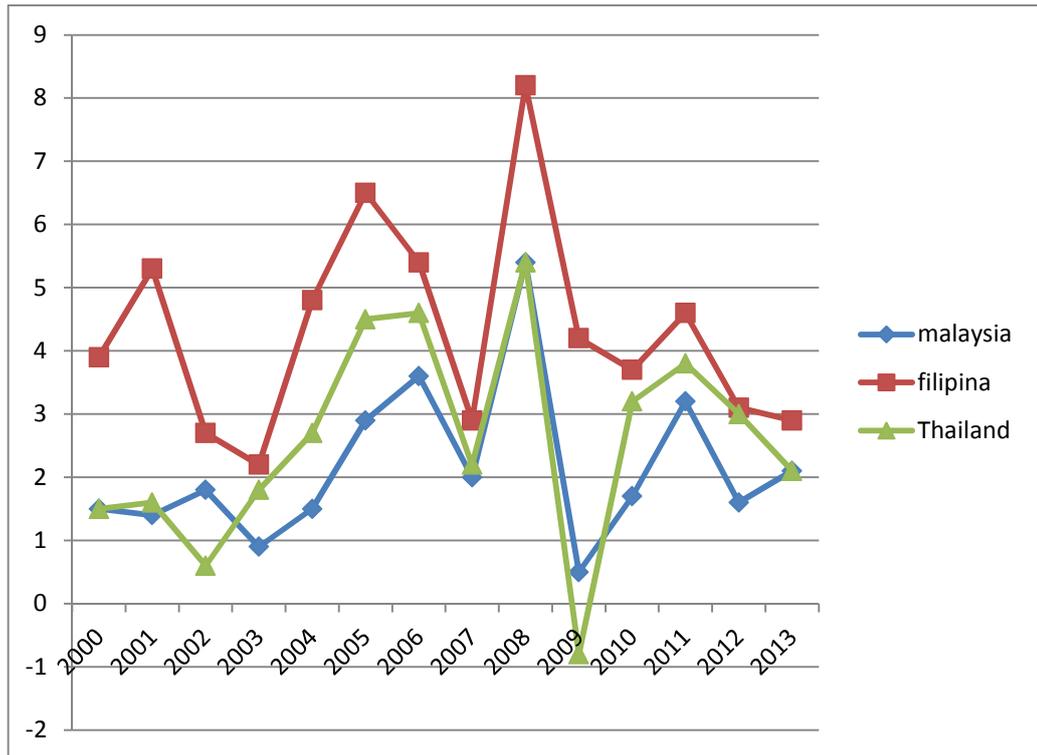
sebagai tujuan utama sasaran kebijakan moneter dapat diterima diseluruh dunia.

(Bernanke, Mishkin, 1997)

Dalam pelaksanaan Penargetan inflasi, pemilihan sasaran operasional merupakan salah satu hal yang penting dilakukan, dimana pemilihan sasaran ini tergantung pada kemampuan bank sentral mengontrol hubungan sasaran operasional tersebut dengan aktivitas perekonomian. Dalam hal ini terdapat dua pilihan, yaitu jika bank sentral menggunakan suku bunga sebagai sasaran akhir, maka respon kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan Ketentuan Taylor (*Taylor Rule*).

Sedangkan jika menggunakan *base money* sebagai sasaran kebijakan operasional moneter, maka respon kebijakan dapat menggunakan *Mc Callum rule* (Khan, 2003) . Sejak dimulainya kerangka penargetan inflasi, ada 42 negara diseluruh dunia yang mulai mengadopsi rezim kebijakan moneter dengan kerangka penargetan inflasi. Contoh beberapa negara yang sukses menerapkan kebijakan penargetan inflasi diantaranya Selandia baru, Inggris, Jerman, dan Kanada.

Selandia baru adalah negara yang pertama mengadopsi kerangka penargetan inflasi sebagai kerangkaperumusan kebijakan moneter menyeluruh pada tahun 1990 dan Indonesia mulai mengadopsinya pada tahun 2005. (sumber : B.I). Di bawah terdapat grafik yang menunjukkan pergerakan inflasi IHK di negara wilayah Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Thailand.



Gambar 3. Pergerakan Inflasi IHC di tiga negara

(Sumber : World Bank)

Berdasarkan data dari *World Bank* diatas dapat dilihat bahwa ketiga negara mengalami fluktuasi inflasi yang beragam pada tahun 2008, Negara Malaysia, Thailand, dan Filipina mengalami titik tertinggi dari peningkatan inflasi yakni sebesar 5,44 %, 5,46 %, dan 8,26 %. Sementara itu titik terendah dari Filipina berada pada tahun 2003 yakni sebesar 2,28 , Malaysia pada tahun 2009 yakni sebesar 0,99 % dan Thailand mengalami inflasi negatif atau deflasi yakni sebesar -0,84 %. Setelah kenaikan inflasi tertinggi pada tahun 2008 di ketiga negara secara perlahan kondisi inflasi mengalami penurunan dan dapat dikendalikan dibawah 5%.

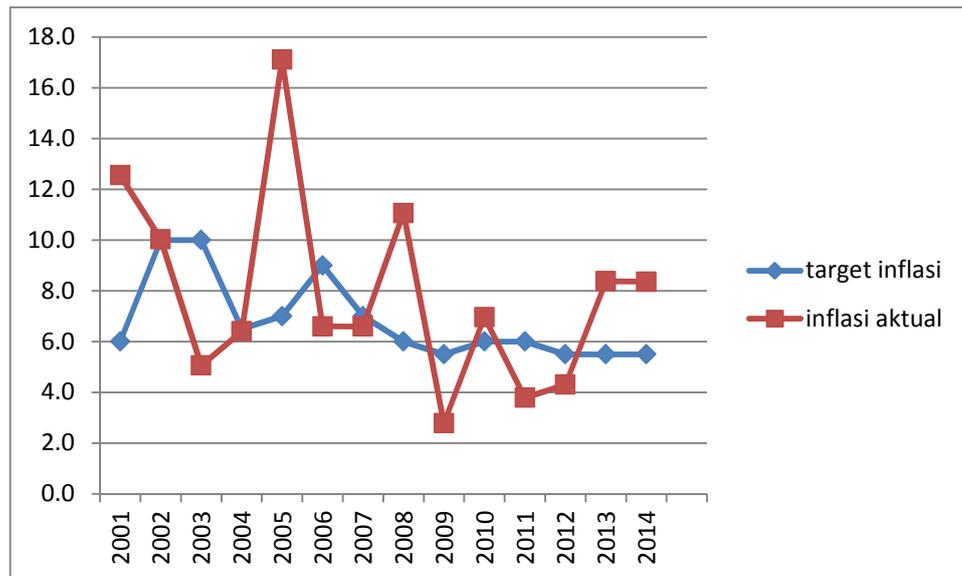
Negara negara diatas telah menetapkan Kerangka penargetan inflasi secara menyeluruh dalam pengambilan kebijakannya. Dengan keberhasilan ini bank sentral di negara- negara tersebut memiliki kredibilitas yang meningkat sepanjang

waktu sehingga dengan ITF dipercaya mengurangi dampak negatif dari inflasi yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan negara maju diatas dalam penerapan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka kebijakan untuk negara lain untuk menjaga keseimbangan harga dan nilai mata uang.

Penetapan penargetan inflasi pada periode 2000 sampai dengan 2005 adalah uang primer (*monetary base*) sebagai sasaran kebijakan operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia dengan asumsi perubahan uang primer akan mempengaruhi komposisi neraca perbankan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perekonomian, akan tetapi hasil yang dicapai kurang memuaskan karena pada kenyataannya target inflasi yang telah ditetapkan sering tidak sesuai dengan inflasi yang terjadi (Astuti, 2009). Secara umum, ada beberapa hambatan yang membuatnya tidak sejalan dengan kerangka penargetan inflasi, yang diantaranya uang primer sulit dikendalikan oleh bank sentral sebab perilaku permintaan uang kartal pada masyarakat Indonesia, hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan mengalami hubungan yang terbalik, respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakang (*backward looking*) artinya inflasi sebagai sasaran akhir moneter dapat juga dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian di masa lalu dan untuk pengendaliannya akan lebih sulit untuk dilakukan, sinyal kebijakan moneter oleh masyarakat kurang efektif.

Bulan Juli 2005, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *inflation targeting framework*, dengan mencakup empat elemen mendasar yaitu penggunaan *BI Rate* sebagai

sasaran operasional pengendalian moneter, perumusan kebijakan moneter yang antisipatif (*forward looking strategy*) dalam mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk mengarahkan sasaran pencapaian inflasi kedepan , strategi komunikasi yang lebih transparan untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan upaya untuk pembentukan ekspektasi inflasi, dan penguatan koordinasi kebijakan pemerintah untuk meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan *administrated price* dan *volatile foods* maupun untuk sinergi kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Langkah – langkah dimaksud untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (*good governance*) kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir yaitu kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan amanat UU no 3 tahun 2004 dimana Tujuan Bank Indonesia (BI) yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebab Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang supaya inflasi dan pengangguran sesuai dengan lajuyang diharapkan, sehingga tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang.(Materi sosialisasi ITF, Bank Indonesia,2005)



Gambar 4. Pergerakan inflasi aktual dan penargetan inflasi

(Sumber : Bank Indonesia ,diolah)

Semenjak Bank Indonesia memulai kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) dari 2005:07-2014:07, dapat dilihat perkembangan inflasi selama periode 2005 sampai 2014 yang mengalami fluktuasi yang beragam inflasi tertinggi terjadi pada periode 2005 sebesar 17.11% kemudian bergerak turun pada tahun 2006 sebesar 6.6% setelah itu naik kembali pada tahun 2008 yaitu sebesar 11.06% dikarenakan pada saat itu terjadi krisis global yang melanda Amerika sehingga berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangannya setiap tahun inflasi terendah diperoleh pada periode 2009 yaitu sebesar 2.78% namun kemudian mengalami kenaikan pada periode 2010 yaitu sebesar 6.69% dan kemudian mengalami penurunan pada periode 2011 sebesar 3.79% hingga kemudian mengalami kenaikan pada periode 2013 sebesar 8.38% yang menyebabkan persentase pertumbuhan ekonomi melalui grafik, dapat dilihat inflasi aktual yang dapat mengacu dari penargetan inflasi yang dihasilkan yang diharapkan dengan adanya penargetan inflasi diprediksi dapat menggerakkan

perekonomian secara umum. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku bunga acuan bank indonesia atau dengan kata lain BI Rate yang menjadi sinyal bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya seperti tabungan, deposito dan kredit. Menurut Yodiatmaja (2012:3) perubahan BI *Rate* akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berupa peningkatan level BI *Rate* bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI *Rate* naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan mempengaruhi para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang mengurangi aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut :

1. Bagaimanakah kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap inflasi selama 2005:07 – 2014:07.
2. Bagaimanakah kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap nilai tukar Rp/US selama 2005:07 – 2014:07
3. Bagaimanakah kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap pertumbuhan ekonomi selama 2005:07 – 2014:07

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia selama periode 2005:07-2014:07 memiliki tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap inflasi periode 2005:07 – 2014:07
2. Untuk menganalisis kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap nilai tukar Rp/\$ US periode 2005:07 – 2014:07
3. Untuk menganalisis kinerja kebijakan moneter dalam periode ITF melalui BI rate terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2005:07 – 2014:07

D. Manfaat Penelitian

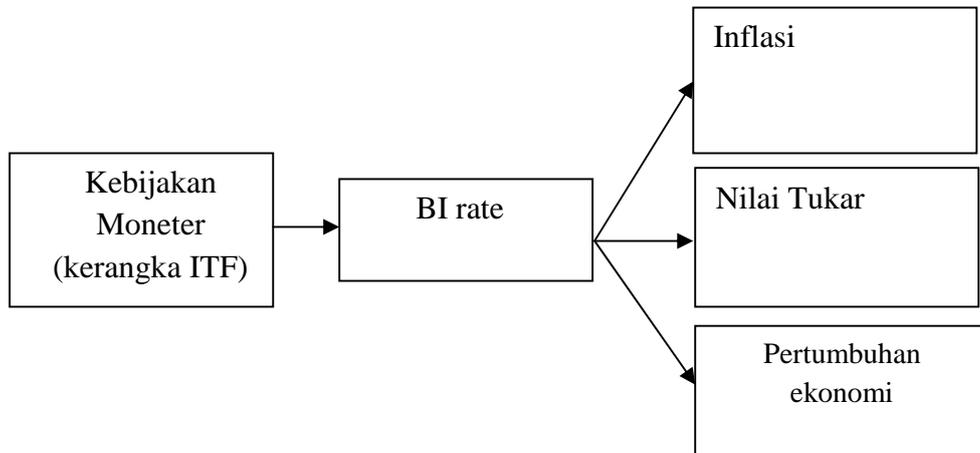
Melalui penelitian yang dilakukan melalui Analisis kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia selama periode 2005:07-2014:07 diharapkan :

1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu referensi atau masukan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pengaruh *inflation targeting framework* sebagai kerangka kebijakan moneter di masa mendatang.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Untuk meneliti apakah dengan diberlakukannya ITF melalui jalur suku bunga memberikan kontribusi yang positif bagi jalannya perekonomian di Negara berkembang pada umumnya.
4. Sebagai referensi bagi bagi Civitas akademika Universitas Lampung.

E. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2005, Bank Indonesia sepenuhnya menggunakan kerangka penargetan inflasi (*Inflation targeting framework*) sebagai landasan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan kerangka ini dengan fokus dalam mengendalikan inflasi melalui acuan suku bunga (BI Rate). Menurut Dr. M. Natsir, S.E. M.Si dalam jurnalnya menulis bahwa kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui acuan suku bunga dapat dibagi dalam dua tahap :

1. Transmisi di sektor keuangan (moneter). Kebijakan ini berpengaruh pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga deposito. Selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga kredit konsumsi di masyarakat. Proses ini memerlukan tenggat waktu tertentu (*time lag*).
2. Transmisi dari sektor keuangan ke sektor riil berpengaruh terhadap investasi dan konsumsi. Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi karena suku bunga deposito merupakan komponen pendapatan dari masyarakat (*income effect*) dan suku bunga kredit merupakan pembiayaan konsumsi masyarakat (*substitution effect*). Sedangkan pengaruh suku bunga terhadap investasi dikarenakan suku bunga kredit merupakan komponen pembiayaan modal. Selanjutnya pengaruh suku bunga tersebut dalam konsumsi dan investasi akan mempengaruhi jumlah permintaan agregat.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

Dari bagan diatas Kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui kebijakan suku bunga acuan dapat melalui Surat Bank Indonesia (SBI) dan Suku bunga Deposito. Suku bunga deposito akan memberikan pengaruh langsung terhadap konsumsi yang akan dilakukan masyarakat, dengan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga deposito bank maka akan mempengaruhi masyarakat dalam menyimpan dananya di bank atau membelanjakannya. Suku bunga kredit akan memberikan stimulus yang tidak langsung terhadap minat investasi masyarakat di dalam maupun diluar negara. Sementara itu itu BI rate sebagai saluran kebijakan moneter yang ekspansif mempengaruhi langsung nilai tukar rupiah yang mengacu langsung terhadap mata uang asing (US Dollar).

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian analisis kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia periode 2005:07-2014:07 ini adalah :

1. Diduga bahwa kebijakan moneter dalam kerangka ITF melalui BI rate memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi dalam kurun waktu dimulainya ITF 2005:07-2014:07
2. Diduga bahwa kebijakan moneter dalam kerangka ITF melalui BI rate memiliki pengaruh positif terhadap nilai tukar Rupiah dalam kurun waktu 2005:07-2014:07
3. Diduga bahwa kebijakan moneter dalam kerangka ITF melalui BI rate memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2005:07-2014:07

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sebuah sistematika penulisan untuk menjelaskan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah untuk memahami skripsi ini yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran menggambarkan permasalahan penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang dibahas dengan lugas dan jelas.

Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi tentang teori inflasi, kerangka kebijakan moneter, *inflation targeting framework*(ITF), teori suku bunga, nilai tukar, serta teori pertumbuhan ekonomi, serta penelitian-penelitian terdahulu.

Metodologi Penelitian

Merupakan bab yang berisi metode penelitian tentang jenis dan sumber data dan metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisi hasil dan pembahasan, berisi tentang hasil analisis dari penelitian, serta pembahasan yang menerangkan hasil penelitian.

Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan hasil analisis dari penelitian, dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.